

MODERATISME PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

Isfihani

Institut Mamba'ul ulum

isfihani@gmail.com

Abstrak

Abdurrahman Wahid memikirkan berbagai sudut pandang yang tidak berdimensi dan sudut pandang yang beraneka ragam sehingga sulit untuk dipahami. Masyarakat harus bisa mencermati pemikiran Gus Dur untuk dapat memahaminya. Di mata sebagian orang, teks seperti Gus Dur banyak mengandung konteks, atau harus dibaca sesuai konteks di balik teks tersebut. Namun bagaimanapun juga sebagai bagian dari pemikiran Gus Dur bisa dikategorikan sebagai pemikiran yang moderat. Dalam persoalan pluralisme, ia menekankan realitas kehidupan beragam keyakinan dan pola keyakinan bangsa Indonesia harus dihormati, sehingga ia mengambil jalan tengah antara pemikir fundamentalis dengan pemikir liberal. Bahwa dalam demokrasi, ia menerima demokrasi sebagai sebuah keniscayaan untuk memperjuangkan pluralisme yang telah digagasnya sambil sangat membela demokrasi Pancasila, karena ia mengambil jalan tengah antara penganut agama negara dan negara sekuler, sedangkan dalam hukum Islam, ia berpendapat bahwa Hukum Islam hendaknya dikembangkan sesuai dengan kehidupan sekitar, dan lebih menekankan pada substansi (esensi) agama dibandingkan makna tersurat dari ajarannya. Bahkan pandangan ini sebagai konservatif jalan tengah yang menutup pintu ijtihad dengan paham liberalisme yang terlalu bebas dalam ijtihad.

Kata kunci: Pemikiran Moderat Gus Dur, Pluralisme di Indonesia, Hukum Islam dan Ijtihad

Abstract

Abdurrahman Wahid thinks of various dimensionless points, multifaceted perspectives, and viewpoints that are tricky to understand. People should be able to look at Gus Dur's thoughts to understand them. In some people's eyes, like Gus Dur, text contains a lot of context, or it should be read as the context behind the text. But anyway, as part of the thought, Gus Dur could be categorized as moderate thinking. In the issue of pluralism, he emphasizes the reality that the life of diverse beliefs and belief patterns of the Indonesian nation must be respected, so he took the middle ground between a fundamentalist thinker and a liberal thinker. Whereas in a democracy, he accepted democracy as necessary to fight for pluralism that has

digagasnya while highly defended Pancasila democracy because he took a middle path between the followers of the State religion and the secular state. At the same time, he argued that Islamic law should be developed by the life around and more emphasis on religion's substance (essence) rather than the explicit meaning of the teachings. Even this view as a middle-of-the-road conservative who shut the door of ijtihad with the liberalism that too free in ijtihad.

Keywords: *Pemikiran Moderat Gus Dur, Pluralisme di Indonesia, Hukum Islam dan Ijtihad*

A. Pendahuluan

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam prosesi pemakaman Gus Dur menyatakan, bahwa almarhum adalah bapak pluralisme dan multikulturalisme, sementara Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutnya sebagai pejuang prularisme¹. Dalam banyak hal pemikiran Abdurrahman Wahid yang biasa dipanggil Gus Dur dianggap tidak biasa, dan seringkali pemikirannya menciptakan pertentangan di mana-mana, Ia dianggap sebagai intelektual liberal juga sekaligus sebagai figure religius dan bahkan pemimpin kharismatik.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah sosok fenomenal, unik dan khas. Fenomenal, karena ia selalu menawarkan ide-ide mengagetkan sekaligus kontroversial bagi nalar *mainstream*. Unik karena dalam dirinya melekat berbagai atribut, baik sebagai ahli ilmu sosial, tokoh LSM, agamawan sekaligus sebagai setingkat wali. Khas , karena ia sebagai representasi tokoh yang sangat gigih membela kepentingan minoritas agar tidak tertindas, ditindas bahkan menjadi kekuatan penindas. Ia merupakan tokoh pemersatu bangsa Indonesia yang tidak hanya menerima perbedaan di antara masyarakat yang berbeda suku dan agama, tapi juga mengakuinya.

Pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, cucu KH Hasyim Asyari itu juga lantang mengecam kekerasan atas nama suku dan agama. Selain itu, ia sering mengkritik pendekatan pemerintah terhadap kaum minoritas. Tak mengherankan, ketika ia wafat pada 30 Desember 2009, iring-iringan jenazahnya ke pemakaman diikuti berbagai macam warga dari beragam agama dan suku, terutama suku.

Gerakan Gus Dur membela minoritas selalu ditegaskan dalam berbagai kesempatan. Seperti dalam peluncuran bukunya *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, pada 2006, Gus Dur menyampaikan pidato mengenai pluralisme yang menjadi isi buku tersebut. Kata dia, roh buku itu diambil dari keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama pada

¹ Irwan Suhanda (ed), *Gus Dur Santri Par Excellence Teladan Sang Guru Bangsa*, Jakarta, PT Kompas 2010 h.ix

1935. Mukhtar memutuskan menjalankan syariat Islam tapi tidak perlu negara Islam di Indonesia.

Gus Dur juga menolak peraturan daerah yang diklaim berdasarkan syariah Islam yang mulai menyebar di Indonesia sejak masa reformasi karena prinsip otonomi daerah. "Tuhan tidak perlu dibela," katanya. "Tapi umat-Nya atau manusia umumnya justru, yang perlu dibela." Gus Dur satu garis dengan ulama Mesir, Ali Abdul Raziq, yang setuju bahwa tak ada negara Islam. Tidak aneh jika saat Orde Baru menyatakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi dan partai politik, Gus Dur enteng saja menerima. Padahal gagasan asas tunggal ini sangat ditentang organisasi kemasyarakatan Islam saat itu. Gus Dur sering mengatakan bahwa yang ia perjuangkan adalah Islam berwatak kultural, bukan Islam yang selalu ingin tampil di kelembagaan politik.

Membicarakan gaya komunikasi Gus Dur, sama halnya dengan membuka peluang bagi munculnya multi-tafsir atas berbagai gaya yang ditampilkannya. Sikap Gus Dur yang lentur menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang selalu diperhitungkan siapapun. Dia tidak alergi untuk bertemu dengan banyak orang, mendengar dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan orang atau kekuatan politik yang berseberangan dengannya. Membaca Gus Dur ibarat membaca skenario cerita yang diwarnai oleh banyak kejadian tak terduga.²

Gaya komunikasi Gus Dur memang unik dan berbeda dengan kebanyakan tokoh nasional maupun internasional. Dia seringkali membuka diskursus di media massa tentang banyak hal, termasuk persoalan yang bagi sebagian orang dianggap sebagai isu sensitif. Mengkritik dan bersikap oposan terhadap orang dan kelompok tertentu yang dianggap menyeleweng seolah menjadi *trade mark* diri Gus Dur.³

Gus Dur mencoba menetralkan ketegangan hubungan Islam dan negara dengan dua tawaran sekaligus: Menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Dua tawaran ini antara satu dengan lainnya saling menunjang mempunyai implikasi sosiologis-politis yang tidak terelakkan yaitu menempatkan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan sosio-kultural dan politik di Indonesia. Gagasan pribumisasi Gus Dur ini tampaknya ingin memperlihatkan Islam sebuah agama yang apresiatif terhadap

² . Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Mitra Cendikia, Jakarta : 2004), hal.152

³ . Ibid, Faisal Ismail, *Dilema NU*.....hal. 153

konteks-konteks lokal.⁴

Intelektualisme Gus Dur tak hanya terbentuk oleh pergumulannya dengan ideologi-ideologi modern. Gus Dur juga dikenal rajin berziarah ke makam para wali. Salah satunya ke makam Syekh Abdul Qo-dir al-Jailani, pendiri tarekat Qadariyah. Gus Dur juga mendalami ajaran Imam Junaid al-Baghdadi. Bahkan petualangan Gus Dur ini sampai ke Universitas McGill, Kanada. Ia mempelajari ilmu-ilmu kajian keislaman, tidak lama di sana, Gus Dur pulang ke Indonesia, menyemai pemikirannya.

Ada beberapa pemikiran Gus Dur yang dapat dikategorikan sebagai moderat,

Istilah *moderat* (moderate) berasal dari bahasa Latin *moderare* yang artinya *mengurangi* atau *mengontrol*. Kamus *The American Heritage Dictionary of the English Language* mendefinisikan moderate sebagai: *not excessive or extreme* (tidak berlebihan dalam hal tertentu). Kesimpulan awal dari makna etimologi ini bahwa moderat mengandung makna obyektif dan tidak ekstrim, sehingga definisi akurat Islam Moderat adalah Nilai-nilai islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan (*I'tidal* dan *wasath*).

Sebagai satu sistem ajaran dan nilai, sepanjang sejarahnya, Islam tidak menafikan kemungkinan mengambil istilah-istilah asing untuk diadopsi menjadi istilah baru dalam khazanah Islam. Tetapi, istilah baru itu harus benar-benar diberi makna baru, yang sesuai dengan Islam. Istilah itu tidak dibiarkan liar, seperti maknanya yang asli dalam agama atau peradaban lain. Kita sudah banyak mengambil istilah baru dalam Islam, seperti istilah “agama”, “pahala”, “dosa”, “surga”, “neraka”, yang berasal dari tradisi Hindu, tetapi kita berikan makna baru yang sesuai dengan konsep Islam. Dari peradaban Barat saat ini, kita mengambil banyak istilah, seperti istilah “worldview”, “ideologi”, dan sebagainya. Semua istilah bisa diadopsi, asalkan sudah mengalami proses adaptasi (penyesuaian makna) dengan makna di dalam Islam, sehingga tidak menimbulkan kekacauan makna.

B. SEKILAS MENGENAL ABDURRAMAN WAHID

Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Gus Dur lahir di Denanyar, Jombang Jawa Timur, pada 4 Agustus 1940. Ia merupakan seorang intelektual Indonesia yang menonjol dan sangat disegani. Sejak kecil Gus Dur dididik dan dibesarkan dalam keluarga pesantren dan di bawah naungan keluarga

⁴ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal.140

ulama. Kakeknya sendiri adalah K.H.Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pelopor Pesantren Tebuireng Jombang, sedangkan ayahnya K.H Wahid Hasyim selain Ulama juga merupakan tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama R.I pada tahun 1950. Dari garis keturunan Ibunya Gus Dur juga mewarisi darah ulama sebut saja K.H Bisri Syamsuri adalah kakeknya.⁵

Abdurrahman Addakhil, adalah julukan Gus Dur kecil. Pada saat bocah, tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya, Gus Dur lebih memilih ikut kakeknya dari pada tinggal bersama orang tuanya. Di saat serumah dengan kakeknya itulah, Gus Dur mulai mengenal politik dari orang-orang yang tiap hari hilir-mudik di rumah kakeknya.⁶

Ayahnya K.H Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama yang membuat keluarganya harus menetap di Jakarta, karena kedudukan sang ayah ini pula, untuk kesekian kalinya GusDur kecil lebih akrab dengan dunia politik yang didengar dari rekan ayahnya yang sering mangkal di rumah mereka. Selain itu, Gus Dur sendiri tergolong bocah yang amat peka mengamati sekitarnya. Berdasarkan pengakuan ibunya, Ny. Wahid Hasyim, "Sejak usia lima tahun, dia sudah lancar membaca. Gurunya, waktu itu, adalah ayahnya sendiri."⁷

Kegemaran Gus Dur selain melahap segala macam buku seperti filsafat, sejarah, agama, cerita silat hingga fiksi sastra, juga melahap majalah, dan surat kabar, dia juga bermain bola, catur, musik, dan menonton film. Pada tahun 1955, Ia masuk SMEP Gowongan sambil nyantri di Pesantren Krapyak. Penguasaannya terhadap bahasa asing seperti Inggris, Arab, dan Jerman, semakin membuatnya 'gila buku'. Tak heran kalau pada usia 15 tahun, bocah *nyeleneh* ini sudah melahap *Das Kapital*-nya Karl Mark, filsafat Plato, Thalles, novel-novel William Bochner dan buku-buku lain yang dipinjamnya dari berbagai perpustakaan dan juga gurunya di Pesantren dan SMEP.⁸

Setamat dari SMEP Jogjakarta, Gus Dur kembali melanjutkan

⁵ . Dedy D. Malik, Idi S. Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik*, (Zaman Wacana Mulia, Jakarta : 1998), hal. 78-79

⁶ . lihat dalam *KOMPAS* 3 Desember 1989. juga Ibid. Dedy D. Malik, Idi S. Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia.....*, hal. 79

⁷ . Tulisan ini dapat dilihat dalam *Editor*, 22 Desember 1990. Ibid. Dedy D. Malik, Idi S. Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia.....*, hal. 79

⁸ . Ellyasa Darwis (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (LKIS, Jogjakarta : 1994), hal. 59

perantauan intelektualnya ke Pesantren Tegalrejo Magelang sekitar tiga tahun. Namun, karena Ia merasa pendalamannya terhadap ilmu agama masih belum cukup, maka Gus Dur memutuskan untuk kembali ke Jombang tepatnya di Pesantren kakeknya dari nasab ibunya. Selama di Pesantren hari-hari Gus Dur banyak dihabiskan hanya untuk mengaji.

Pada tahun 1964, Gus Dur memperoleh beasiswa belajar di *Ma'had Ali Dimsat al-Islamiyah* Universitas al- Azhar Kairo dengan mengambil spesialisasi Syari'ah. Gus Dur yang ketika berangkat ke Arab berusia 23 tahun sudah memiliki 1000 baris gramatika bahasa Arab yang dihafalnya diluar kepala. Merasa tidak cocok dengan dunia atmosfir intelektual yang lebih menekankan pada metode hafalan. Yang menurutnya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan pesantren di Indonesia, "Yang diajarkan di sana, ya *Jalalayn* lagi", ungkap Gus Dur. Dengan demikian Gus Dur justru jarang masuk kuliah dan lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca di perpustakaan terlengkap di Kairo, yaitu *American University Library*. Serta menonton film.⁹

Merasa jenuh belajar di Mesir, Gus Dur lalu pindah ke Bagdad untuk mengikuti kuliah di Universitas Bagdad. Di Bagdad, Gus Dur bukannya memperdalam studi-studi keislaman, akan tetapi Ia malah mempelajari sastra dan kebudayaan Arab, filsafat Eropa, dan teori social.¹⁰ Tak lama kemudian di tempat inilah, bakat empirismenya tumbuh pesat. Di lingkungan yang baru tersebut, Gus Dur banyak membaca karya-karya fenomenal seperti pemikiran Emile Durkheim, Lenin, Mao Zedong, Gramsci, Ortega Y. Gasset. Spengler, dan lainnya.¹¹

Sebagai pribadi yang gemar membaca, Gus Dur melahap buku apa saja. Modalnya untuk itu adalah penguasaan bahasa : Arab, Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis. Selain membaca Gus Dur ternyata juga suka musik. Nampaknya Gus Dur lebih menyukai Simphoni ke-9 Beethoven daripada musik *Gambus*. Menurutnya simphoni berisikan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan manusia, apa itu bukan ajaran ajaran Islam?, tanya Gus Dur retorik. Sedangkan tentang dunia film, sejak kecilpun sudah digumulinya. Kebetulan, pada saat Gus Dur tinggal di Jakarta, rumahnya berdekatan dengan

⁹. Faizal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Mitra Cendikia, Jakarta : 2004), hal. 190

¹⁰. Greg Barton, *Liberalismen: Dasar-dasar Progesifitas Pemikiran Abdurrahman Wahid*, (Centre of Southeast Asian Studies Monash University, Victoria : 1994), hal 168

¹¹. Greg Barton, *Liberalismen: Dasar-dasar Progesifitas Pemikiran Abdurrahman*, hal. 170

gedung bioskop, sehingga hampir setiap saat jika ada pemutaran film bagus, Gus Dur dapat dipastikan menonton. Bahkan tak peduli jika esok harinya Ia harus ada ulangan di sekolahnya.¹²

Pada tahun 1984, Gus Dur terpilih menjadi ketua Tanfiddziyah PBNU 1984-1989 dan terpilih kembali untuk periode 1989-1994 dan pada tahun 1994 terpilih kembali untuk ketiga kalinya untuk periode 1994- 1999. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI ke keempat, menggantikan BJ Habibie, namun pada tanggal 23 Juli 2001 mandat selaku Presiden RI dicabut melalui sidang rapat paripurna sidang istimewa MPR RI. Pada tahun 2002 terpilih kembali menjadi ketua Umum Dewan Syuro PKB periode 2002- 2007 lalu terpilih kembali 2005-2010, dan pada tanggal 30 Desember 2009 beliau menghembuskan nafas terakhirnya di RS Cipto Mangun Kusumo, Jakarta pada usia 69 tahun.

Dari berbagai fenomena yang menyatu dengan diri dan kepribadian Gus Dur tersebut, menarik jika kita mencoba untuk masuk menelaah lebih jauh pemikiran Gus Dur. Namun demikian penulis hanya akan membatasinya pada pemikiran moderatnya sebagai seorang intelektual bukan tokoh agama yang berkutut dengan dunia kepesantrenannya. Tentu saja, tulisan ini merupakan kajian pustaka yang mencoba mengangkat secara simple beberapa pemikiran Gus Dur tersebut.

C. Pluralism

Salah satu aspek yang sangat mudah dipahami dari sosok si kiai ini adalah pemikirannya tentang pluralisme. Prularisme yang dikembangkan Gus Dur ini tidak hanya pada tataran pemikiran , melainkan menjadi sebuah tindakan sosial politik.¹³ Karena nilai-nilai pluralisme akan dapat menjadikan masyarakat memiliki pemahaman dan perilaku religius yang berjalan paralel dengan kemampuan mereka untuk dapat hidup bersama orang lain yang berbeda etnik, budaya dan agama (*to live together*).

Menurut Gus Dur, Prularisme pertama-tama dimulai dari kesadaran tentang pentingnya perbedaan dan keragaman. Sebab perbedaan merupakan fitrah yang harus dirayakan dan dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun harmoni. Kaum muslim di Indonesia akan banyak ditempatkan sebagai "aktor utama", karena

¹² . Lihat Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*, (LKIS, Jogjakarta : 1997), hal. 39

¹³. Irwan Suhanda (ed), *Gus Dur Santri Par Excellence Teladan Sang Guru Bangsa*, Jakarta, PT Kompas 2010 h.x

berkaitan dengan posisinya yang mayoritas. Oleh karena itu, bagaimana respons yang diberikan kaum muslim akan sangat mempengaruhi wadah kehidupan umat beragama di Indonesia. Kedudukan kaum muslim yang semacam ini dapat memberikan jawaban-jawaban yang solutif, dengan tetap memenuhi hak-hak keimanan terhadap agamanya, dan tuntutan kewajiban kebangsaannya¹⁴.

Sebenarnya pluralisme tidak harus dilihat dengan kacamata "ideologis", ia cukup dimengerti sebagai suatu pengakuan bahwa manusia hidup tidak mungkin pernah bisa memungkiri kenyataan hidup yang plural: berahekaragam nilai, pandangan, kemauan, dan kepentingan. Kenyataannya, Tuhan sendiri telah mengutus untuk umat-Nya berbagai Nabi dan Rasul yang masing-masing membawa *risalah* yang berbeda dari waktu ke waktu sebagai suatu jalan yang mengantarkan kebahagiaan manusia.¹⁵ Dalam Islam jalan itu dikenal dengan istilah *shirath*, *syari'ah*, *thariqah*, *minhaj*, atau *sabil*. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa islam itu hanyalah 'jalan' atau 'sarana' menuju Tuhan itu amat lebar dan plural. Meminjam istilah Cak Nur "Satu Tuhan, Banyak Jalan,".¹⁶

Yang menarik dari persoalan ini, mengingat belakangan muncul arus yang kian deras menentang paham pluralisme agama karena dianggap dapat dimentahkan komitmen keberagamaan atau dianggap sebagai wacana impor belaka.¹⁷ Sebenarnya, dalam memberikan jawaban terhadap pluralisme agama, kaum muslim harus dapat memberikan jawaban yang sekaligus memenuhi tuntutan aspek "teologis-normatif" dan aspek "sosial-historis" keberagamaannya. Dengan kata lain bahwa respons yang diberikan tersebut harus tetap mengacu kepada doktrin-doktrin agamanya, dan sekaligus memperhatikan faktor sosial-historis kehidupan masyarakat.

Gus Dur adalah pembela kelompok minoritas, khususnya

¹⁴ Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Intelectual Indonesia*, Pustaka Relajar, Yogyakarta:2006 hal, 85

¹⁵ Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 49-62

¹⁶ Nurcholish Madjid, "*Dialog di Ahli Kitab: Sebuah Pengantar*" dalam *Tiga Agama Satu Tuhan*, ed. George B Grose & Benjamin J Hubbard (Bandung: Mizan, 1998), h. xix

¹⁷ Fatwa MUI pada tahun 2005 antara lain "mengharamkan" paham pluralisme dan liberalisme agama. Fatwa ini muncul sebagai respon atas berbagai paham liberalisme agama yang dinilai sudah menyentuh wilayah yang membahayakan aqidah. Tentang pluralisme sebagai wacana impor, lihat Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Senior-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 334 dst.

China –khonghucu- Indonesia, bahkan Ia juga tidak segan membela kelompok agama minoritas, keyakinan, dan kelompok lain yang dianggap terdiskriminasi dan dilanggar hak kemanusiaannya.¹⁸ Dengan bahasa lain Gus Dur dapat dipahami sebagai figure yang memperjuangkan diterimanya kenyataan social bahwa Indonesia itu beragam, dia sangat mencintai kebudayaan Islam tradisionalnya dan juga pesan utama Islam itu sendiri. lebih dari itu, Gus Dur adalah seorang tokoh spiritual dan tokoh moderat yang mampu menyeimbangkan kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Gagasan pluralisme pada prinsipnya merupakan sebuah konsep yang potensial untuk meredam konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat heterogen di mana tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan keunikan budaya kelompok etnis sangat lumrah terjadi.¹⁹ Masyarakat pluralis diciptakan mampu memberi ruang yang luas bagi berbagai identitas kelompok secara otonom. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem budaya (*culture system*) dan tatanan sosial yang mapan dalam kehidupan dalam masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa.

Gagasan di atas akan membentuk sebuah persepsi yang hidup dalam masyarakat bahwa budaya bukanlah suatu kemutlakan yang mesti dipertahankan. Budaya dipahami sebagai sebuah gerak "kreatif masyarakat yang dibangun oleh gerakan prinsip yang berbeda (*revisting*) yang kemudian membentuk sebuah kesepakatan bersama tentang nilai, pandangan, dan sikap masyarakat (*reinventing*). Artinya, budaya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang tentunya dipengaruhi oleh faktor ekstern yang mengelilingi kehidupan.²⁰

Ada satu pertanyaan mendasar yang sering diungkapkan

¹⁸ . Greg Barton, *Sebuah Pengantar memahami Abdurrahman Wahid*. Untuk lebih jelasnya lihat dalam *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (LKIS, Jogyakarta, 1999), hal. XXii

¹⁹ Pertengahan tahun 2002, Jurnal Antopologi UI mengadakan Simposium Internasional yang bertemakan "*Membangun Kembali Indonesia yang Bhincka Tunggal Ika menuju Masyarakat Multikultural*". Simposium ini menghasilkan konsep penting bahwa keragaman budaya sebagai akar berdirinya sebuah komunitas besar (bangsa) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terletakkan. Sebagaimana dikatakan oleh Gus Dur, kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan yang majemuk atau pluralistik. Sebuah bangsa tidak akan berkembang apalagi tingkat pluralistiknya kecil. Begitu pula dengan sebuah bangsa yang besar jumlah perbedaan kebudayannya, akan menjadi kerdil apabila ditekan secara institusional, bahkan akan merusak nilai-nilai yang ada dalam budaya itu sendiri. Akibatnya, perpecahan dan tindakan-tindakan yang mengarah kepda *anarkhi* menjadi sebuah sikap alternatif masyarakat ketika pengakuan akan identitas dirinya terhambat. Lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), h.11.

²⁰ Ibid, 77

kalangan “barat” terhadap Gus Dur, bagaimana bisa terjadi seseorang yang begitu mencintai agamanya dan khususnya sub-kultur agamanya tempat ia tumbuh, mampu menjadikannya seorang yang pluralistik dan *non-chauvinis*.²¹ Salah satu idiom populer barat modern atau budaya yang terbaratkan adalah bahwa hanya dengan melepaskan dogmatismelah seseorang dapat menjadi pluralis dan moderat.

D. Demokrasi

Menurut Gus Dur demokrasi menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi pluralisme tidak semata-mata sebagai suatu yang *human*, tetapi juga karunia Tuhan yang bersifat permanen, karena tanpa pluralisme sejarah dan peradaban manusia akan tidak produktif, bahkan kehilangan perspektifnya yang bersifat dinamis dan dialektis²²

Minat Gus Dur yang sangat tinggi terhadap demokrasi didorong oleh cita-cita untuk menegaskan pluralisme itu. Dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan, dan integritas bangsa²³

Ide besar yang selalu diusung oleh Gus Dur selama ini adalah proses demokratisasi di Indonesia yang sedang mengalami peralihan. Kalau diperhatikan betul, Gus Dur selalu membuat berbagai diskursus di publik untuk menjelaskan berbagai aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan tumbuhnya kekuasaan yang demokratis dan mempengaruhi public untuk mengubah dan mempertahankan suatu betuk susunan masyarakat yang demokratis pula.²⁴

Gus Dur berpendapat, bahwa antara Islam dan demokrasi tidak bertentangan, bahkan secara khusus, dalam hal demokrasi Pancasila

²¹ Ibid, Greg Barton, *Sebuah Pengantar*.....

²² Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal.140

²³ Abdurrahman Wahid, Islam, Pluralisme, dan Demokratisasi, dalam Arief Afandi (Ed.), *Islam Demokrasi atas bawah : Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:1997, hal, 117-118

²⁴ . *Opcid*, Faisal Ismail, *Dilema NU*.....hal. 155

Gus Dur sangat jelas pembelaannya. Hal itu terlihat pada pernyataan yang dibuatnya untuk mendukung Pancasila sebagai asas tunggal pada saat muktamar NU di Situbondo tahun 1983 yang menyatakan dukungan setia kepada Pancasila. Dia menyatakan antara keduanya memang tidak bisa disamakan semuanya, namun ada hubungan fungsional dan simbiotik antara keduanya. Islam adalah wadah seluruh keimanan umat Islam, sementara Pancasila harus mewadahi seluruh aspek agama di Indonesia²⁵

Gus Dur menempatkan Pancasila sebagai aturan permainan yang menghubungkan semua agama di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu Pancasila sudah seharusnya menempatkan semua agama dan semua anggauta masyarakat pada posisi setara di depan hukum, tidak diskriminatif. Oleh sebab itu apapun bentuk dan seberapa pun kualitasnya, sungguh-sungguh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan prinsip demokrasi yang modern²⁶

Oleh karena itu, agama hanya berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara atau dengan kata lain sumber bagi Pancasila di samping sumber-sumber lain. Ini adalah inti hubungan antara Islam dan Pancasila, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa²⁷.

Dalam kaitannya Pancasila dan asas tunggal yang dipakai NU, Gus Dur menjelaskan bahwa dalam pandangan NU Pancasila netral saja. Hal ini dikatakannya sebagai bentuk pengamalan dari prinsip ahlussunnah wal jamaah yang mendasarkan pendapat Imam Syafii tentang tiga jenis Negara, yaitu negara Islam, negara perang, dan negara damai. Pemerintahan yang memakai ideologi demokrasi Pancasila adalah negara damai, sehingga harus dipertahankan, sebab syari'ah dalam bentuk etika masih diperlihatkan oleh anggauta masyarakat muslim sekalipun di dalamnya tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk Undang-undang Negara.

E. Hukum Islam

Gus Dur memandang bahwa hukum Islam harus menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan bangsa, sebagai kumpulan peraturan dan tata cara yang harus diikuti oleh seorang yang patuh

²⁵ Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Intelektual Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2006 hal, 85

²⁶ Ibid,

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, PT Grafindo, Jakarta,1999, hal 92

memeluk agamanya, hukum Islam memiliki pengertian yang lebih dari hanya sekedar ruang lingkup hukum yang dikenal umumnya. Dalam pandangannya, hukum Islam selain mengandung pengertian akan hal-hal yang lazimnya dikenal sebagai bidang juridis, juga meliputi soal-soal ritual keagamaan, etika dari soal cara bersopan santun hingga kepada spekulasi estetis dari para mistikus (*mutasawwifin*) yang terhalus.²⁸

Sementara corak pemikiran hukum Islam yang menjadi sasaran kritik Gus Dur adalah sifatnya yang apologetik, hanya mampu mencanangkan suatu gambaran dunia yang terlalu ideal, sehingga hukum Islam itu kehilangan relevansinya dengan perkembangan kehidupan di sekitarnya. Hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, diantaranya dengan mampu menjadikan dirinya sebagai penunjang hukum nasional dan meletakkan titik berat perhatiannya pada soal-soal duniawi yang menggeluti kehidupan bangsa dewasa ini, sekaligus memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan aktual masyarakat.²⁹

Gus Dur lebih menekankan aspek substansi (hakikat) dari ajaran agama ketimbang makna tersurat dari ajaran tersebut, Dia meyakini benar bahwa ekspresi Islam paling benar hanya dapat diraih ketika semangat hukum dan hakikat dijadikan hal yang paling utama daripada yang tersurat dalam hukum³⁰

Gus Dur menyatakan bahwa orientasi paham ke-Islaman sebenarnya adalah kepentingan orang kecil dalam hampir seluruh persoalannya. Lihat saja kata "*masalahah 'ammah*" yang berarti kesejahteraan umum. Inilah yang seharusnya menjadi obyek dari segala macam tindakan yang diambil pemerintah. Kata kesejahteraan umum, dan atau kemaslahatan umum itu tampak nyata dalam keseluruhan umat Islam, yang langsung tampak nyata semisal, adalah kunci dalam adagium fiqih: Tindakan atau kebijakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin sepenuhnya bergantung kepada kebutuhan atau kesejahteraan mereka (*tasarruf al-imam 'ala ar-ra'iiyah manutun bi al-maslahah*)³¹

²⁸ . Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (LKIS, Yogyakarta, 1999), hal. 35

²⁹ . Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal.125. Lihat juga Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004, hal 93.

³⁰ *Ibid* . Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004, hal 93.

³¹ Abdu.rrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara, Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), him. 21-22.

Adapun yang tidak langsung mengenai kebutuhan orang banyak dapat dilihat dalam adagium lain: Menghindarkan kerusakan atau kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan atau kebaikan (*dar'ul al-mafasid muqaddam'ala jalbi al-masalih*). Artinya menghindari hal-hal yang merusak umat lebih diutamakan atas upaya membawakan kebaikan bagi mereka. Dengan demikian, menghindari kerusakan dianggap lebih berarti daripada mendatangkan kebaikan.

Selanjutnya Gus Dur juga berpendapat bahwa hukum Islam juga terkait dengan soal-soal perdata urusan perorangan hingga urusan perniagaan dan moneter, soal-soal pidana dari penetapan bukti dan saksi hingga pada penetapan hukuman mati, ketatanegaraan, hubungan internasional, dan seribu satu masalah lain yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan, karenanya apa yang secara sederhana diistilahkan dengan “hukum Islam”, sebenarnya lebih tepat dinamai keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Lebih jauh lagi Gus Dur mengutip pendapat MacDonald, bahwa hukum Islam adalah “*the science of all things, human and divine.*”³²

Namun demikian, Gus Dur berpandangan bahwa hukum Islam mengalami proses irelevansi secara berangsur-angsur tapi pasti, soal-soal perdata dan pidana telah banyak dipengaruhi, diubah dan didesak oleh hukum perdata modern, hukum ketatanegaraan dan internasionalnya mengalami nasib yang sama. Tinggal lagi soal-soal ibadat yang masih mendapat tempat sepenuhnya dalam kehidupan, itupun dalam kadar dan intensitas yang semakin berkurang, dan bergantung kepada kemauan perorangan para pemeluk agama Islam yang masih taat.³³ Dalam menanggapi perubahan hukum Islam itu Gus Dur senantiasa menyitir ungkapan: *Al muhaafadhaat 'alaa alqaadimi al shaalih wa alakhdu bi aljadiid al aslah*³⁴

Dalam hal demikian, masih dapatkah dipertahankan kebenaran *claim* hukum Islam sebagai penentu pandangan hidup dan tingkah laku kaum muslimin. Gus Dur memandang walaupun dalam praktek hukum Islam tidak lagi berperan secara utuh dan menyeluruh, namun hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya. Hal ini disebabkan: *Pertama*, hukum Islam turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, minimal

³² Ibid, Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran.....*, hal. 35

³³ . Ibid, Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran.....*, hal. 36

³⁴ . Dedy Djamaluddin Malik , Idi Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M Amin Rais, Nurcholis Majid, Jalaluddin Rakhmat, Zaman wacana Mulia, Bandung, 1998, hal 86.

dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan dan larangan agama. *kedua*, hukum Islam dapat diserap dan menjadi bagian hukum positif yang berlaku, walaupun ini membutuhkan proses yang tidak cepat. *Ketiga*, adanya golongan yang memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam, penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang memiliki *appeal* cukup besar, dan dengan demikian ia menjadi bagian dari manifestasi kenegaraan Islam yang masih harus ditegakkan di masa depan, betapajauhnyapun masa depan tersebut.³⁵

F. PENUTUP.

Gus Dur berpikir dari berbagai titik perspektif yang berdimensi banyak segi dan sudut pandang sehingga sulit dimengerti. Orang harus mampu mencermati pemikiran Gus Dur untuk dapat memahaminya. Di mata sebagian orang, Gus Dur bagaikan teks yang mengandung banyak konteks, atau, ia harus di baca sebagai konteks dibalik teks. Namun toh demikian sebagian pemikiran Gus Dur itu bisa dikategorikan sebagai pemikiran yang moderat.

Dalam masalah pluralisme, dia mengedepankan kenyataan kehidupan yang beraneka ragam corak keyakinan dan kepercayaan bangsa Indonesia yang harus dihormati, oleh sebab itu dia mengambil jalan tengah di antara pemikir yang fundamentalis dengan pemikir yang liberal. Sedangkan dalam demokrasi, dia menerima demokrasi sebagai suatu keniscayaan untuk memperjuangkan pluralisme yang telah digagasnya sedangkan demokrasi Pancasila sangat dibelanya, karena dia mengambil jalan tengah antara pengikut Negara agama dan Negara sekuler, Sementara dalam hukum Islam, dia berpendapat bahwa hukum Islam itu harus berkembang sesuai dengan kehidupan di sekitarnya, dan lebih menekankan aspek substansi (hakikat) dari ajaran agama ketimbang makna tersurat dari ajaran tersebut. Inipun pandangannya sebagai jalan tengah dari kaum kolot yang menutup pintu ijtihad dengan kaum liberalisme yang terlalu bebas dalam berijtihad.

G. DAFTAR PUSTAKA

Barton, Greg, *Liberalismen: Dasar-dasar Progesifitas Pemikiran Abdurrahman Wahid*, Centre of Southeast Asian Studies Monash

³⁵ . Ibid, Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran.....*, hal. 36,

University, Victoria : 1994

Darwis, Ellyasa (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, LKiS, Yogyakarta : 1994

Djamaluddin, Dedy, Malik , Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid*, M Amin Rais, Nurcholis Majid, Jalaluddin Rakhmat, Zaman wacana Mulia, Bandung, 1998,

El-sastrow, *Gus, Siapa Sih Sampeyan*, LKiS, Yogyakarta : 2000

Husaini, Adian, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Senior-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

Ismail, Faisal, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, Mitra Cendikia, Jakarta :2004.

Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004

Madjid, Nurcholish ,*"Dialog di Ahli Kitab: Sebuah Pengantar"* dalam *Tiga Agama Satu Tuhan*, ed. George B Grose & Benjamin J Hubbard (Bandung: Mizan, 1998)

Malik,Dedy D. Idi S. Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik*, Zaman Wacana Mulia, Jakarta : 1998

Qodir, Zuly, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Intelectual Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2006

Suhanda, Irwan, (ed), *Gus Dur Santri Par Excellence Teladan Sang Guru Bangsa*, Jakarta, PT Kompas 2010

Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999,

Wahid, Abdurrahman, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*, LKiS, Yogyakarta : 1997

-----, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, LKiS, Yogyakarta, 1999

-----, *Pergulatan Negara, Agama, dan kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001)

-----, *Membangun Demokrasi*. Bandung: Rosdakarya, 1999.

-----, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1999.

-----, *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2000

-----, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS, 2000,

-----, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara*,

- Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
- , *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001
- , . Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab: Sebuah Pergumulan Wacana dan Transformasi. Jakarta: Fatma Press, 1998.
- , *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lappenas, 1981
- , Bunga Rampai Pesantren: Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid. Jombang: Dharma Bhakti, 1978.